



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN
TAHUN 2015-2019**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan Periode 2010-2014.....	2
1.1.2 Permasalahan utama (<i>strategi issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.....	7
1.2 Dasar Hukum	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	10
2.1 Visi.....	10
2.2 Misi	10
2.3 Tujuan Strategis	10
2.4 Sasaran Strategis	10
BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	12
3.1 Tugas Pokok	12
3.2 Fungsi.....	12
3.3 Struktur Organisasi	12
3.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal	13
3.3.2 Direktorat Pembelajaran	14
3.3.3 Direktorat Kemahasiswaan.....	15
3.3.4 Direktorat Penjaminan Mutu	16
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	17
4.1 Target Kinerja Eselon 1 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.....	17
4.2 Target Kinerja Eselon 2 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.....	17
4.2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.....	17
4.2.2 Direktorat Pembelajaran	18
4.2.3 Direktorat Kemahasiswaan.....	19
4.2.4 Direktorat Penjaminan Mutu	20
4.3 Kerangka Pendanaan.....	21
BAB V PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Periode 2010-2014	5
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	17
Tabel 3. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Belmawa.	18
Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Sekretariat Direktorat Pembelajaran	18
Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Direktorat Kemahasiswaan	19
Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Direktorat Penjaminan Mutu.....	20
Tabel 7. Matrik Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Belmawa.....	22
Tabel 8. Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pembelajaran.....	22
Tabel 9. Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Kemahasiswaan.....	23
Tabel 10. Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Penjaminan Mutu	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Belmawa	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam pembangunan Indonesia. Dengan kemajuan iptek, globalisasi, dan semakin bergesernya perekonomian dunia pada ekonomi berbasis pengetahuan, telah berdampak langsung terhadap meningkatnya daya saing global. Kemajuan pembangunan ini membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang semakin tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan tinggi terus meningkat.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), postur tenaga kerja Indonesia adalah pekerja lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah berjumlah sebesar 54 juta orang (47,1%) atau hampir setengah dari total pekerja sebesar 114,6 juta orang. Kemudian pekerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20,3 juta orang (17,7%), pekerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat sebesar 29,1 juta orang (25,4%). Jumlah paling rendah ditemui pada pekerja lulusan universitas dengan jumlah 8,2 juta orang (7,1%) dan lulusan diploma sejumlah 2,9 juta orang (2,5%). Hal ini ironis karena data menunjukkan bahwa mutu pendidikan tenaga kerja Indonesia masih rendah.

Indonesia memiliki potensi keunggulan di tengah masyarakat dunia, dikenal sebagai 'Bonus Demografi'. Angka populasi penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta dan terus meningkat hingga 2035, sekitar 37% merupakan anak-anak dan remaja berusia 0 – 19 tahun, yang mana di masa yang akan datang akan menjadi ujung tombak bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Berdasarkan data proyeksi McKinsey Global Institute tahun 2012, Indonesia menempati posisi ke-16 sebagai negara dengan ekonomi terbesar. Pada tahun 2030, Indonesia akan masuk ke dalam jajaran 7 negara dengan ekonomi terbesar, seiring dengan peningkatan jumlah kelas menengah baru dengan laju mencapai 300.000 jiwa per tahun. Hal ini tentunya dengan syarat apabila Indonesia mampu membenahi dan menjamin pendidikan generasi mudanya hingga jenjang tertinggi.

Pendidikan tinggi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir terus tumbuh dengan cukup signifikan. Pada akhir tahun 2015 jumlah mahasiswa di Indonesia telah mencapai lebih dari 7,4 juta orang. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2015 (33,6%) masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga (Malaysia 48%, Thailand 51%).

Dari sisi daya saing, Indonesia saat ini menempati posisi ke-34 dalam *Global Competitiveness Report* (GCR) tahun 2014-2015. Ini adalah posisi terbaik Indonesia sejak 2010 dimana ketika itu berada di posisi ke-44 dan sempat memburuk di tahun 2012-2013, di mana Indonesia berada pada peringkat 50. Namun demikian, Indonesia masih berada di bawah Singapura (peringkat ke-2), Malaysia (peringkat ke-20), bahkan Thailand (peringkat ke-31). Oleh karenanya, peran pendidikan tinggi menjadi sangat sentral dalam membangun daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi (lulusannya), kualitas, efektivitas riset, dan teknologi.

Ini adalah salah satu tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019, Visi Kemenristekdikti 2015-2019 adalah “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”, dengan misi:

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.

Salah satu sasaran strategis Kemenristekdikti adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi. Di mana tugas ini diemban langsung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa). Secara substansial strategi kebijakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan diarahkan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), lulusan bersertifikat kompetensi, mahasiswa dan lulusan berkemampuan wirausaha, mahasiswa mendapat medali emas di kancah internasional, mutu LPTK, dan calon pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru.

1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan Periode 2010-2014

Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Periode 2010-2014, yaitu terwujudnya “sistem pendidikan tinggi yang sehat dan bermutu, menghasilkan insan beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil”. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Direktorat Belmawa) berperan sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, standardisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan.

Sejalan dengan Visi Ditjen Dikti tersebut, Direktorat Belmawa merumuskan dan menetapkan Visi 2010-2014, yaitu “terwujudnya sistem peningkatan kualitas pembelajaran guna menghasilkan mahasiswa yang kompeten dan berkarakter Indonesia”. Visi tersebut diturunkan dalam suatu Dokumen Rencana Strategis Direktorat Belmawa 2010-2014 dengan 5 Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. terdukungnya semua lapisan masyarakat yang layak menjadi mahasiswa melalui berbagai model pembelajaran;
2. terbantunya seluruh lapisan masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang berpotensi akademik baik untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi;
3. tersedianya sistem pembelajaran yang berkualitas dan mampu menumbuhkembangkan karakter bangsa Indonesia;
4. terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dunia internasional; dan
5. terciptanya wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi sesuai bakat dan minat guna mampu beradaptasi pada kehidupan bermasyarakat baik pada skala nasional maupun internasional.

Seluruh Sasaran Strategis tersebut merupakan suatu jembatan pencapaian 2 Sasaran Strategis Ditjen Dikti 2010-2014, yaitu: (1) keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi; dan (2) ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan.

Dari 5 (lima) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Direktorat Belmawa menyusun 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan alat ukur capaian kinerja institusi. Hasil pengukuran kinerja pada setiap Sasaran Strategis ditampilkan dalam Tabel 1 (Pengukuran Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2010-2014). Berdasarkan tabel tersebut, target capaian IKU/IKK Direktorat Belmawa 2010-2014 secara umum berhasil memenuhi target, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang ditentukan.

Untuk mencapai sasaran strategis pertama, yaitu “terdukungnya semua lapisan masyarakat yang layak menjadi mahasiswa melalui berbagai model pembelajaran”, Direktorat Belmawa menyelenggarakan kegiatan perubahan model pembelajaran dengan tujuan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Pada tahun 2013, Direktorat Belmawa merumuskan model pembelajaran akademi komunitas, model dan modul pendidikan jarak jauh, implementasi pengakuan pembelajaran lampau, serta implementasi pendidikan inklusi. Hal ini dilakukan agar pendidikan tinggi lebih dapat menjangkau lapisan masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan APK. Pada tahun 2014 fokus pelaksanaannya adalah pembangunan sistem aplikasi agregator dengan melibatkan 6 perguruan tinggi yang mewakili konsorsium Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM) untuk menyiapkan, menyelenggarakan dan mengembangkan konten Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT). Sampai akhir tahun 2014 IKK jumlah mahasiswa baru hasil perubahan model pembelajaran tercatat mencapai angka 119.828 mahasiswa atau dengan kata lain terealisasi 106% dari target yang ditetapkan sebesar 113.285 mahasiswa. Angka pencapaian tersebut bersifat kumulatif dari perolehan tahun-tahun sebelumnya dan memperkuat model pembelajaran baru lainnya seperti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Pengembangan Akademi Komunitas, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan model pendidikan inklusif yang beberapa diantaranya telah dikembangkan sejak tahun 2010.

Sasaran strategis kedua “terbantunya seluruh lapisan masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang berpotensi akademik baik untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi”, dicapai melalui penyaluran beasiswa dan bantuan biaya pendidikan pemerintah kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; mahasiswa menerima beasiswa dunia usaha dan donor lainnya (CSR); dan penyaluran beasiswa bagi mahasiswa peraih medali dalam olimpiade SAINS. Target mahasiswa perguruan tinggi negeri penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan pemerintah tahun 2014 dapat terlampaui sebesar 120% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan akumulasi penyaluran beasiswa dan bantuan biaya pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), beasiswa PEDP dan beasiswa prestasi. Selain itu, khusus kelompok beasiswa prestasi, terdapat indikator jumlah mahasiswa peraih medali dalam olimpiade SAINS yang menerima beasiswa dimana berhasil tercapai 101% dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, tingkat capaian penyaluran beasiswa dan bantuan biaya pendidikan pemerintah bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta belum dapat memenuhi target yang ditetapkan karena kendala keterbatasan alokasi anggaran.

Sasaran Strategis “tersedianya sistem pembelajaran yang berkualitas dan mampu menumbuhkembangkan karakter bangsa Indonesia” bertujuan untuk melaksanakan kebijakan dibidang pembelajaran, penjaminan mutu dan kemahasiswaan yang diwujudkan diantaranya melalui kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penyesuaian kurikulum dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), program revitalisasi bidang ilmu, implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Seluruh upaya yang dilaksanakan di tahun 2014 mampu menghasilkan capaian yang membanggakan dimana realisasi IKK jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran menyentuh angka 9.442 prodi dari target yang ditetapkan sebesar 6.175 prodi atau dengan kata lain terealisasi 153%. Angka ini dilihat dari jumlah prodi di seluruh Indonesia yang mendapatkan akreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Capaian Sasaran Strategis berikutnya yaitu “terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dunia internasional” diwujudkan melalui capaian atas indikator kinerja jumlah prodi memenuhi standar mutu sarana dan prasarana, waktu tunggu mendapatkan kesempatan berkarya pertama (bulan), persentase prodi kesehatan yang terakreditasi, persentase prodi kesehatan yang berakreditasi minimal B dan persentase prodi vokasi yang terakreditasi minimal B. Capaian indikator kinerja jumlah prodi memenuhi standar mutu sarana dan prasarana adalah sebesar 165% dari target yang ditetapkan. Salah satu upaya yang ditempuh dalam keberhasilan capaian tersebut adalah program sertifikasi laboratorium sains perguruan tinggi berdasarkan ISO 17025. Disamping itu, upaya lainnya yang bertujuan meningkatkan jumlah prodi memenuhi standar mutu sarana dan prasarana adalah proyek pengembangan relevansi dan efisiensi pendidikan tinggi dengan sumber pendanaan pinjaman luar negeri Islamic Development Bank (IDB) yang mulai berjalan efektif pada tahun 2014.

Sasaran strategis “terciptanya wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi sesuai bakat dan minat guna mampu beradaptasi pada kehidupan bermasyarakat pada skala nasional dan internasional” diwujudkan melalui indikator kinerja jumlah mahasiswa yang mengikuti program peningkatan kompetensi. Direktorat Belmawa memfasilitasi pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa melalui dukungan penyelenggaraan pembinaan prestasi mahasiswa dengan berbagai kegiatan kompetitif dalam bidang akademik serta bidang minat dan bakat. Tahun 2014 diperoleh capaian 26.704 mahasiswa dari target 12.500 mahasiswa atau dengan kata lain sebesar 214%. Terdapat 4 (empat) *output* dengan skala nasional dan internasional yang digunakan dalam pencapaian indikator ini, yaitu mahasiswa melaksanakan belajar bekerja terpadu, mahasiswa berprestasi unggul dalam minat dan bakat, mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik dan unit kegiatan mahasiswa yang sehat. Sejak tahun 2010, Direktorat Belmawa juga memfasilitasi keterlibatan mahasiswa Indonesia dalam program student mobility. Program ini direncanakan untuk mendorong dan mempercepat terjadinya internasionalisasi. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi proses peningkatan kualitas mahasiswa agar memiliki wawancara yang luas mengenai bidang masing-masing yang bertaraf internasional. Isu student mobility sangat penting dalam membangun integrasi sistem PT regional yang dicita-citakan oleh ASEAN. Dari sisi mahasiswa Indonesia, Direktorat Belmawa memandang program ini dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa Indonesia untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan mereka di bidang ilmu yang terkini.

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Periode 2010-2014

Sasaran Strategis Ditjen Dikti	Sasaran Strategis Direktorat Belmawa	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2010		2011		2012		2013		2014	
				Target	Realisasi								
Keterjangkau, Kesetaraan, dan Keterjaminan Akses untuk Memperoleh pendidikan Tinggi	Terdukungnya semua lapisan masyarakat yang layak menjadi mahasiswa melalui berbagai model pembelajaran	APK PT & PTA Usia 19-23 Tahun	Pertambahan Jumlah Mahasiswa Baru Hasil Perubahan Model Pembelajaran	22,80%	24,67%	25,10%	27,01 %	26,75%	30,20%	28,60%	29,87%	30,0%	29,15%
	Terbantunya seluruh lapisan masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang berpotensi akademik baik untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa/ Bantuan Biaya Pendidikan	Persentase Mahasiswa PTN Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah	6,20%		9,40%	8,03%	13,80%	12,40%	13,80%	15,2%	13,80%	17,00%
			Persentase Mahasiswa PTS Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah	2,00%		2,50%	2,81%	2,70%	1,90%	2,90%	2,00%	3,10%	2,00%
			Persentase Mahasiswa Menerima Beasiswa Dunia Usaha dan Donor Lainnya (CSR)	4,00%		5,00%	4,93%	6,00%	5,10%	7,00%	4,90%	8,00%	5,00%
			Jumlah Mahasiswa Peraih `Medali dalam Olimpiade Sains yang Menerima Beasiswa	60		62	70	65	70	68	82	70	71
Ketersediaan Pendidikan Tinggi Indonesia yang Bermutu dan Relevan	Tersedianya sistem pembelajaran yang berkualitas dan mampu menumbuhkembangkan karakter bangsa Indonesia	Persentase Prodi terakreditasi	Jumlah Prodi yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran	4.200		4.900	4.925	5.275	5.275	5.275	6.373	6.175	9.442
	Terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dunia internasional	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	Jumlah Prodi Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana	9.500		10.000		10.500	11.529	11.000	12.927	11.500	18.987
			Waktu Tunggu Mendapatkan Kesempatan Berkarya Pertama (Bulan)	11		10	8,5	9	9	8	8	6	7
			Persentase Prodi Kesehatan yang Terakreditasi	29%		30%	68%	32%	73%	37%	55,3%	42%	55%
			Persentase Prodi Kesehatan yang Terakreditasi Minimal B	49%		50%		52%	64%	57%	64,2%	62%	64%

Sasaran Strategis Ditjen Dikti	Sasaran Strategis Direktorat Belmawa	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2010		2011		2012		2013		2014	
				Target	Realisasi								
			Persentase Prodi Vokasi yang Terakreditasi Minimal B	66,70%		71,70%	50,72%	76,70%	43%	81,70%	43,1%	86,70%	34%
	Terciptanya wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi sesuai bakat dan minat guna mampu beradaptasi pada kehidupan bermasyarakat pada skala nasional dan internasional	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Program Peningkatan Kompetensi	-		6.950		8.500	16.704	10.500	23.903	12.500	26.704

1.1.2 Permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Pada periode 2010-2014, Direktorat Belmawa berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kabinet Kerja) periode 2014-2019, terjadi perombakan dan restrukturisasi kementerian, di mana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi, di namakan sebagai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Begitu juga dengan status Direktorat Belmawa (lingkup Eselon 2), berubah menjadi Direktorat Jenderal Belmawa (lingkup Eselon 1).

Walaupun bagaimanapun, program dan kegiatan prioritas pendidikan tinggi oleh Direktorat Jenderal Belmawa periode 2015-2019 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya (2010–2014). Agar program dan kegiatan periode 2015-2019 dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi, antara lain:

1. Rendahnya persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia, di mana secara relatif menunjukkan bahwa persentase APK pendidikan tinggi di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Menurut data UNESCO tahun 2013, Malaysia memiliki APK sebesar 38,53% dan Thailand sebesar 51,38%. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi harus ditingkatkan.
2. Mayoritas mahasiswa masih berorientasi menjadi *job seeker* (pencari kerja), bukan *job creator* (pembuka lapangan kerja/wirausahawan) sebagai profesi utama. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya kreativitas, daya juang, dan kewirausahaan yang diterapkan sebagai bagian dari sistem pembelajaran dan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Terlebih lagi masih ditemukan perguruan tinggi yang lebih fokus pada waktu ketepatan lulus mahasiswanya dan kecepatan memperoleh pekerjaan, dibandingkan kesiapan dalam menciptakan lapangan kerja.
3. Belum optimalnya kompetensi lulusan yang sesuai dengan bidang keahliannya dan kebutuhan industri kerja, yang diakui melalui sertifikasi lembaga profesi terkait. Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di mana untuk mendapatkan pekerjaan, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan lebih sulit bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat. Tentunya, tenaga kerja terampil Indonesia harus bisa bersaing di lapangan kerja, baik di dalam dan di luar negeri dengan memiliki sertifikat profesi yang tidak hanya diakui di Indonesia tetapi juga diakui secara internasional. Saat ini uji kompetensi dan sertifikasi tenaga terampil baru dilakukan untuk profesi dokter sejak tahun 2014. Untuk tenaga profesi lainnya seperti insinyur, akuntan, dan arsitek belum dilakukan hingga sekarang.
4. Kualitas pendidikan tinggi masih belum memadai, dilihat dalam konteks program studi yang menunjukkan mayoritas berakreditasi C. Pada tahun terakhir periode 2010-2014, persentase prodi yang terakreditasi unggul belum mencapai target yang ditetapkan, di mana capaian hanya 52% dari target 58%.
5. Kurangnya prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah serta bidang minat dan bakat (mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni) ditingkat nasional maupun internasional.

6. Persentase lulusan yang langsung bekerja relatif rendah, mengingat angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah serta masih terjadinya ketidakselarasan antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa program-program studi yang dikembangkan di perguruan tinggi mengalami kejenuhan karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan perguruan tinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar (60%) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori *white collar jobs* (manajer, profesional) yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). Namun, sebagian dari mereka (30%) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi terampil (tenaga administrasi, sales) bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (*blue collar jobs*). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.
7. Permasalahan lain terkait dengan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia juga terjadi pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Terdapat permasalahan pokok pada pendidikan calon guru di LPTK. Pertama adalah banyaknya jumlah LPTK dan yang kedua adalah rendahnya mutu LPTK yang merupakan wahana untuk meningkatkan tenaga pendidik.
8. Berdasarkan data, peminat untuk menjadi mahasiswa LPTK terus meningkat namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan pokok LPTK yang belum terpecahkan. Dengan demikian, calon guru lulusan LPTK ini dikhawatirkan memiliki kualitas yang tidak terjaga dengan baik. Kita ketahui bahwa guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik, pedagogik, serta secara profesional dapat diterima di lingkungan tempat guru bertugas, baik oleh siswa, kepala sekolah, pengawas orang tua, dan sebagainya. Karena itu, guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan guru yang dirancang berdasarkan standar kompetensi guru untuk menjamin lulusannya menjadi guru profesional.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dasar hukum pembentukan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dasar hukum pembangunan iptek nasional dan pendidikan tinggi tercermin dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Selain itu, tercermin dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD yang menyebutkan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Implementasi program kerja Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan berada di bawah Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta menjalankan amanah sesuai visi dan misi Kemenristekdikti, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan visi sebagai berikut:

“Tercapainya kualitas pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang ideal untuk menghasilkan insan paripurna demi terwujudnya Indonesia berdaya saing tinggi.”

2.2 Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengemban misi:

1. Menghasilkan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional.
2. Meningkatkan standar kualitas sistem pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional.

2.3 Tujuan Strategis

Tujuan strategis yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah “meningkatnya kualitas pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan insan yang unggul, terampil, bermoral, dan berdaya saing tinggi.”

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan strategis di atas, maka dijabarkan sasaran strategis program dan sasaran strategis kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut.

Sasaran strategis program adalah “meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi” .

Sasaran strategis kegiatan adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan pembelajaran.
2. Meningkatnya kualitas layanan kemahasiswaan dan penyiapan karier.
3. Meningkatnya kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
4. Meningkatnya kualitas manajemen program pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ditetapkan dalam Pasal 98, 99, dan 100 pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti.

3.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembelajaran dan kemahasiswaan.

3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

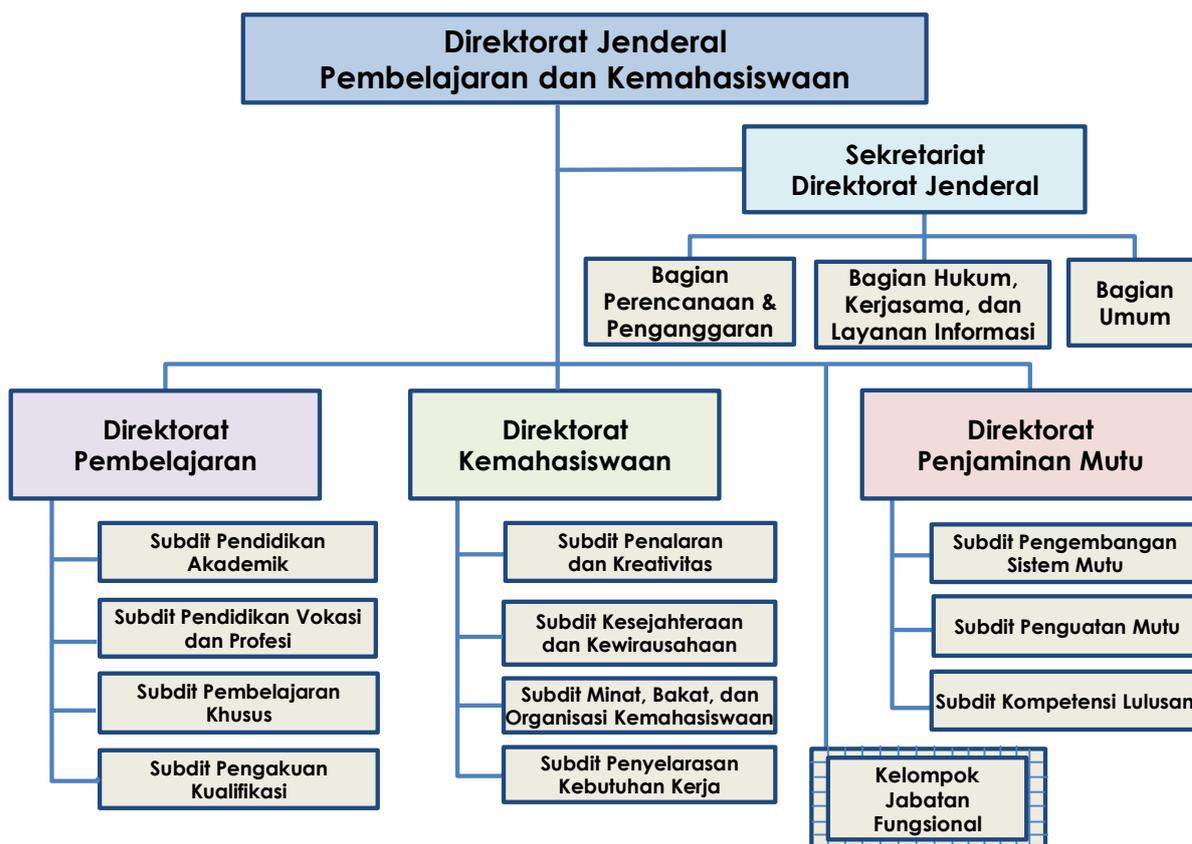
1. perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keterjangkauan layanan pendidikan tinggi dan penyesuaian dunia pendidikan dan dunia kerja;
3. perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi;
4. pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Ditjen Belmawa terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pembelajaran
3. Direktorat Kemahasiswaan
4. Direktorat Penjaminan Mutu

Secara rinci, struktur organisasi Ditjen Belmawa dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Belmawa

3.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Tugas:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Fungsi:

- penyiapan koordinasi kegiatan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama dan layanan informasi;
- penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta pengelolaan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- b. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dan layanan informasi di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- c. Bagian Umum
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa, dan ketatausahaan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.2 Direktorat Pembelajaran

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan standar kualitas sistem pembelajaran, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran.

Fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi;
- b. fasilitasi pembelajaran pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembelajaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan Akademik
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar kualitas sistem pembelajaran, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan akademik.
- b. Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Profesi
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sistem pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan vokasi dan profesi.

- c. Subdirektorat Pembelajaran Khusus
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembelajaran pada pendidikan jarak jauh dan pendidikan khusus.
- d. Subdirektorat Pengakuan Kualifikasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengakuan kualifikasi.
- e. Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan direktorat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.3 Direktorat Kemahasiswaan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemahasiswaan.

Fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja;
- b. fasilitasi di bidang penalaran, kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan penalaran, kreativitas, kewirausahaan, minat kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penalaran, kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penalaran dan Kreativitas
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penalaran dan kreativitas.
- b. Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan dan kewirausahaan.
- c. Subdirektorat Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan.

- d. Subdirektorat Penyelarasan Kebutuhan Kerja
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelarasan kebutuhan kerja.
- e. Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan direktorat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.4 Direktorat Penjaminan Mutu

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan mutu.

Fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
- b. fasilitasi di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem Mutu
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem mutu.
- b. Subdirektorat Penguatan Mutu
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan mutu.
- c. Subdirektorat Kompetensi Lulusan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetensi lulusan.
- d. Subbagian Tata Usaha
Melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Eselon 1 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikti pada periode 2015-2019, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKSS dan target Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang akan dicapai pada periode 2015-2019 dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	26,86%	28.16%	29.54%	31,07%	32.56%	Nominal
2	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	Nominal
3	Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi	55%	60%	65%	70%	75%	Nominal
4	Jumlah Prodi terakreditasi unggul	10.800	12.000	13.000	14.000	15.000	Kumulatif
5	Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional	380	390	405	410	420	Nominal
6	Prosentase lulusan yang langsung bekerja	50%	60%	70%	80%	90%	Nominal
7	Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik	17	46	46	46	46	Nominal
8	Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru	4.458	5.458	7.000	9.500	12.000	Nominal

4.2 Target Kinerja Eselon 2 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

4.2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Berdasarkan sasaran strategis program Ditjen Belmawa tahun 2015-2019, maka ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan (*Output*), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Belmawa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan: Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan							
1	Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi	3	3	3	3	3
2	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3	3	3	3	3
3	Hukum, Humas, Kerjasama	Jumlah Dokumen Hukum, Humas, Kerjasama	3	3	3	3	3
4	Layanan Pengelolaan Aset BMN	Jumlah Layanan Pengelolaan Aset BMN	1	1	1	1	1
5	Layanan Kepegawaian	Jumlah Layanan Kepegawaian	1	1	1	1	1
6	Layanan Perkantoran	Operasional Layanan Perkantoran Satker	12	12	12	12	12

4.2.2 Direktorat Pembelajaran

Secara lebih rinci Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Direktorat Pembelajaran yang akan dicapai pada periode 2015-2019 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Sekretariat Direktorat Pembelajaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pembelajaran							
1	Pembelajaran yang memenuhi standar minimal	Jumlah Pedoman Pembelajaran	30	30	30	30	30
		Jumlah Bahan Ajar	30	30	30	30	30
		Jumlah mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	80	150	150	150	150
		Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan PJJ	150	200	300	400	500
		Jumlah Capaian Pembelajaran yang ditetapkan	125	175	225	275	350
2	Mahasiswa mengikuti program transfer kredit	Jumlah mahasiswa mengikuti program transfer kredit	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
3	Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran	Jumlah tutor terlatih untuk pembelajaran khusus	80	150	150	150	150
		Jumlah pelatih perancangan kurikulum	480	480	480	480	480

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
4	Dokumen pengakuan kualifikasi	Jumlah SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri	3.500	4.500	5.500	6.500	7.500
		Jumlah Prodi Penyelenggara RPL	10	15	20	25	30
5	LPTK yang direvitalisasi	Jumlah dokumen standar mutu pendidikan Akademik Kependidikan	0	1	1	1	1
		Jumlah LPTK yang meningkat kapasitas kelembagaan	0	46	46	46	46
6	Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru	Jumlah calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru	4.458	4.458	7.000	9.500	12.000
		Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan kompetensi	6.000	9.000	9.000	12.000	15.000
7	Penyelarasan kebijakan kependidikan	Jumlah dokumen penyelarasan kebijakan kependidikan	1	2	2	2	2

4.2.3 Direktorat Kemahasiswaan

Capaian Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Direktorat Kemahasiswaan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Direktorat Kemahasiswaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan: Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir							
1	Layanan kemahasiswaan peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat	Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat nasional	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
		Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan	100	150	125	175	150

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
		matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat internasional					
2	Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan	375.598	545.485	635.540	742.073	881.401
		Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan	24.200	26.600	29.300	32.200	35.400
3	Layanan pengembangan organisasi mahasiswa	Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional	1.440	1.580	1.740	1.900	2.000
4	Layanan pusat karir	Jumlah PT yang Melaksanakan Fungsi Pusat Karir	200	300	400	500	600
5	Dokumen studi penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>)	Jumlah lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Minat mahasiswa yang melaksanakan program kreativitas mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan program kreatifitas mahasiswa	37.557	37.557	37.557	37.557	37.557

4.2.4 Direktorat Penjaminan Mutu

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja Direktorat Penjaminan Mutu, maka ditetapkan Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Direktorat Kemahasiswaan periode 2015-2019 sebagai berikut.

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Direktorat Penjaminan Mutu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi							
1	Layanan mutu program studi	Jumlah Prodi yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu	10.500	12.000	14.000	16.000	20.000
		Jumlah Program Studi Memperoleh Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Jumlah Prodi Penyelenggara Uji Kompetensi	1080	1200	1300	1400	1500
2	Dosen yang	Jumlah Pelatih	50	100	150	200	300

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	mendapatkan pelatihan mutu	SPMI Tingkat Nasional					
		Jumlah Auditor Internal Bersertifikat	40	100	150	200	300
3	Dokumen uji kompetensi	Jumlah Instrumen Baru untuk Uji Kompetensi	5	10	15	20	25
4	Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi	Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi	133.000	140.000	150.000	160.000	170.000

4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Belmawa mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga anggaran pinjaman Hibah Luar Negeri.

Anggaran dalam APBN tersebut terdiri dari dua fungsi anggaran yaitu fungsi pendidikan dan fungsi layanan umum. Total anggaran tahun 2015-2019 yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Belmawa adalah sebesar ... rupiah untuk Program-Program Teknis dan Dukungan Manajemen. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 7. Matrik Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Belmawa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan: Dukungan manajemen untuk program pembelajaran dan kemahasiswaan												
1	Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi	3	3	3	3	3	12,142.57	14,571.08	17,485.30	20,982.36	25,178.82
2	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3	3	3	3	3	4,952.94	5,943.53	7,132.24	8,558.68	10,270.42
3	Hukum, Humas, Kerjasama	Jumlah Dokumen Hukum, Humas, Kerjasama	3	3	3	3	3	1,000.00	1,200.00	1,440.00	1,728.00	2,073.00
4	Layanan Pengelolaan Aset BMN	Jumlah Layanan Pengelolaan Aset BMN	1	1	1	1	1	858.00	1,029.60	1,235.52	148,262.00	1,779.15
5	Layanan Kepegawaian	Jumlah Layanan Kepegawaian	1	1	1	1	1	61,175.00	734.10	880.92	1,057.10	1,268.52
6	Layanan Perkantoran	Operasional Layanan Perkantoran Satker	12	12	12	12	12	5,000.00	6,000.00	7,200.00	8,640.00	10,368.00
Total Alokasi Anggaran								85,128.51	29,478.31	35,373.98	189,228.14	50,937.91

Tabel 8. Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pembelajaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pembelajaran												
1	Pembelajaran yang memenuhi standar minimal		415	585	735	885	1,060	441,253.66	529,504.39	635,405.27	762,486.32	914,983.58
		Jumlah Pedoman Pembelajaran	30	30	30	30	30					
		Jumlah Bahan Ajar	30	30	30	30	30					
		Jumlah mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	80	150	150	150	150					
		Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan PJJ	150	200	300	400	500					
		Jumlah Capaian Pembelajaran yang ditetapkan	125	175	225	275	350					
2	Mahasiswa mengikuti program transfer kredit							4,210.00	5,052.00	6,062.40	7,274.88	8,729.86
		Jumlah mahasiswa mengikuti program transfer kredit	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000					
3	Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran							500.00	600.00	720.00	864.00	1,036.80
		Jumlah tutor terlatih untuk pembelajaran khusus	80	150	150	150	150					
		Jumlah pelatih perancangan	480	480	480	480	480					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		kurikulum										
4	Dokumen pengakuan kualifikasi						2,711.15	3,253.38	3,904.06	4,684.87	5,621.84	
		Jumlah SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri	3.500	4.500	5.500	6.500	7.500					
		Jumlah Prodi Penyelenggara RPL	10	15	20	25	30					
5	LPTK yang direvitalisasi						-	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
		Jumlah dokumen standar mutu pendidikan Akademik Kependidikan	0	1	1	1	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		Jumlah LPTK yang meningkat kapasitas kelembagaan	0	46	46	46	46	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6	Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru						365,510.00	708,984.00	831,000.00	1,116,000.00	1,401,000.00	
		Jumlah calon pendidik yang mengikuti Pnedidikan Profesi Guru	4.458	4.458	7.000	9.500	12.000	200,323.06	213,984.00	336,000.00	456,000.00	576,000.00
		Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan kompetensi	6.000	9.000	9.000	12.000	15.000	165,286.94	495,000.00	495,000.00	660,000.00	825,000.00
7	Penyelarasan kebijakan kependidikan						400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		Jumlah dokumen penyelarasan kebijakan kependidikan	1	2	2	2	2					
Total Alokasi Anggaran								814,584.81	1,275,393.77	1,505,091.73	1,919,310.07	2,359,372.08

Tabel 9. Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Kemahasiswaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan: Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir												
1	Layanan kemahasiswaan peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat		6.100	7.150	8.125	9.175	10.150	24,487.41	29,384.89	35,261.87	42,314.24	50,777.09
		Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat nasional	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000					
		Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi	100	150	125	175	150					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat internasional										
2	Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa		399.798	572.085	664.840	774.273	916.801	3,208,610.42	5,022,587.21	6,027,504.65	7,233,405.58	8,680,486.70
		Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan	375.598	545.485	635.540	742.073	881.401					
		Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan	24.200	26.600	29.300	32.200	35.400					
3	Layanan pengembangan organisasi mahasiswa							120,167.12	144,200.54	173,040.65	207,648.78	249,178.54
		Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional	1.440	1.580	1.740	1.900	2.000					
4	Layanan pusat karir							309.09	370.90	445.08	534.10	640.92
		Jumlah PT yang Melaksanakan Fungsi Pusat Karir	200.00	300.00	400.00	500.00	600.00					
5	Dokumen studi penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>)							614.04	736.85	884.22	1,061.06	1,273.28
		Jumlah lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
6	Minat mahasiswa yang melaksanakan program kreativitas mahasiswa							104,359.00	114,795.00	126,174.00	138,902.00	152,792.00
		Jumlah mahasiswa yang melaksanakan program kreatifitas mahasiswa	37.557	37.557	37.557	37.557	37.557					
Total Alokasi Anggaran								3,458,547.08	5,312,075.39	6,363,310.47	7,623,865.76	9,135,148.53

Tabel 10. Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Penjaminan Mutu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi												
1	Layanan mutu program studi		13.380	15.000	17.100	19.200	23.300	1,780,451.49	2,136,541.79	2,563,850.15	3,076,620.18	3,076,620.18
		Jumlah Prodi yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu	10.500	12.000	14.000	16.000	20.000					
		Jumlah Program Studi Memperoleh Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
		Jumlah Prodi Penyelenggara Uji Kompetensi	1.080	1.200	1.300	1.400	1.500					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
2	Dosen yang mendapatkan pelatihan mutu		90	200	300	400	600	500.00	600.00	720.00	864.00	1,036.80
		Jumlah Pelatih SPMI Tingkat Nasional	50	100	150	200	300					
		Jumlah Auditor Internal Bersertifikat	40	100	150	200	300					
3	Dokumen uji kompetensi		5	10	15	20	25	9,185.20	11,022.24	13,226.69	15,872.03	19,046.43
		Jumlah Instrumen Baru untuk Uji Kompetensi	5	10	15	20	25					
4	Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi		133.000	140.000	150.000	160.000	170.000	500.00	600.00	720.00	864.00	1,036.80
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi	133.000	140.000	150.000	160.000	170.000					
Total Alokasi Anggaran								1,790,636.69	2,148,764.03	2,578,516.84	3,094,220.21	3,097,740.21

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2015-2019 ini diterbitkan sebagai acuan utama penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dengan demikian, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, juga diharapkan lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja keras dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang disertai sinergisitas dengan banyak pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatannya.